

PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN DI KOTA BEKASI

M. ABBYLLA NAINGGOLAN

32.0379

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : Abbylla789@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Drs. Suaib Ibrahim M.Si,

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Welfare is a fundamental right guaranteed by the constitution, as stated in Article 34 of the 1945 Constitution. However, in practice, marginalized groups such as people with disabilities still experience difficulties in accessing full social welfare rights. In Bekasi City, people with disabilities face various obstacles, ranging from budget constraints to social stigma, which hinder the fulfillment of their rights. **Purpose:** This study aims to analyze the urgency of fulfilling social welfare rights for people with disabilities in Bekasi City, by highlighting the role of the government in the social empowerment process. **Method:** The study used a qualitative descriptive approach with Midgley's theory in the T3 dimension (level of life fulfillment, level of problem management, and level of opportunity to develop). Data were obtained through in-depth interviews with relevant stakeholders (government, private sector, community, and people with disabilities) as well as field observations. **Results:** The study shows that although there have been various initiatives from related parties, obstacles such as budget constraints that depend on the APBD, social stigma, and low motivation of individuals with disabilities are still the main challenges. However, there is a commitment from the Social Service, Ministry of Social Affairs, and community leaders in supporting the fulfillment of the rights of people with disabilities, especially through social empowerment strategies. **Conclusion:** Fulfillment of social welfare rights for people with disabilities in Bekasi City requires continuous and collaborative efforts between the government, community, and private sector, with a structured empowerment approach to overcome existing barriers and improve their quality of life.

Keywords: human rights, people with disabilities, social welfare, empowerment.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kesejahteraan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, kelompok marginal seperti penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mengakses hak kesejahteraan sosial secara penuh. Di Kota Bekasi, penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga stigma sosial, yang menghambat pemenuhan hak-hak mereka. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Bekasi, dengan menyoroti peran pemerintah dalam proses pemberdayaan sosial. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori Midgley dalam dimensi T3 (tingkat pemenuhan kehidupan, tingkat pengelolaan

masalah, dan tingkat kesempatan untuk berkembang). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait (pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan penyandang disabilitas) serta observasi lapangan.

Hasil/Temuan: Penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai inisiatif dari pihak terkait, hambatan-hambatan seperti keterbatasan anggaran yang bergantung pada APBD, stigma sosial, serta rendahnya motivasi individu penyandang disabilitas masih menjadi tantangan utama. Namun, terdapat komitmen dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial, dan tokoh masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya melalui strategi pemberdayaan sosial.

Kesimpulan: Pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Bekasi memerlukan upaya berkelanjutan dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dengan pendekatan pemberdayaan yang terstruktur untuk mengatasi hambatan yang ada dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kata Kunci: hak asasi manusia, penyandang disabilitas, kesejahteraan sosial, pemberdayaan.

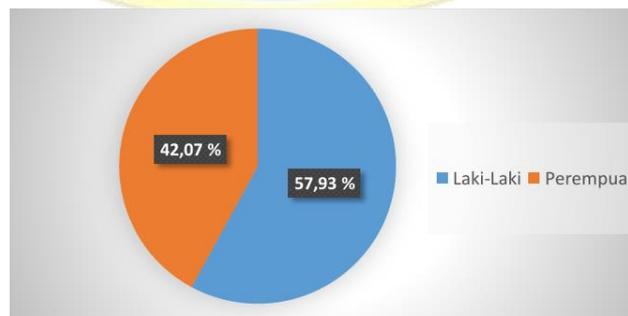
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki keistimewaan berupa akal dan fisik yang memungkinkan untuk berpikir dan beraktivitas secara mandiri. Namun, tidak semua individu memiliki kemampuan fisik atau mental yang sempurna. Penyandang disabilitas, baik yang disebabkan sejak lahir maupun karena kondisi tertentu, tetap memiliki hak yang sama sebagai warga negara, termasuk hak untuk hidup layak dan berkembang secara adil serta bermartabat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28J ayat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami keterbatasan dalam jangka waktu lama dan menghadapi hambatan dalam berpartisipasi secara penuh di masyarakat. Sayangnya, stigma masyarakat terhadap disabilitas masih kuat, menganggap mereka tidak mampu menjalankan peran sosial secara efektif (Zachari dkk., 2024:31; Manopo dkk., 2021:50-51). Hal ini berdampak pada ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Di Jawa Barat, khususnya di Kota Bekasi, jumlah penyandang disabilitas mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data dari Dashboard Jabarprov dan BPS, terdapat 66.907 penyandang disabilitas di Jawa Barat pada tahun 2022, dan 7.944 di antaranya berada di Kota Bekasi.

Gambar 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin



Mayoritas dari mereka belum memiliki pekerjaan tetap dan kurang terlibat dalam program rehabilitasi sosial, yang hanya terealisasi 25% dari target 44%. Hal ini memperlihatkan rendahnya efektivitas program dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya (Hastuti dkk., 2020:11-12). Padahal, Kota Bekasi telah memiliki Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang mengatur hak kesejahteraan sosial, termasuk hak rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan, dan perlindungan sosial. Ketidaksiesuaian antara regulasi dan realita di lapangan menunjukkan masih adanya hak-hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi.

Oleh karena itu, pemenuhan hak kelompok disabilitas, khususnya dalam partisipasi publik dan kesejahteraan sosial, menjadi hal yang penting untuk diteliti. Upaya ini sejalan dengan penguatan hak asasi manusia dan pemberdayaan masyarakat agar kelompok disabilitas dapat hidup mandiri dan berkontribusi aktif di masyarakat (Mutmainnah, 2018:22; Yanuarita, 2021:10).

1.2 Gap Penelitian

Kesenjangan pada penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Bekasi meskipun regulasi sudah tersedia. Terdapat kesenjangan antara target dan realisasi program, rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja, serta minimnya kajian lokal yang mengkaji efektivitas peran stakeholder dalam mendukung pemberdayaan secara menyeluruh. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan serta menggali sinergi antar pihak dalam mewujudkan kesejahteraan disabilitas secara inklusif.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai urgensi pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Bekasi memiliki sejumlah kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikaji. Dari sisi kesamaan, penelitian ini memiliki fokus yang sama dengan studi oleh Hayati (2019), Mulyana dan Wusqo (2023), serta Harahap dan Maheswara (2021), yaitu pada pemberdayaan penyandang disabilitas serta keterlibatan pemerintah sebagai aktor utama. Penelitian ini, seperti halnya studi Hayati (2019), menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam peran pemerintah dalam memberdayakan kelompok disabilitas. Selain itu, kesamaan juga terlihat pada subjek penelitian, yakni penyandang disabilitas sebagai kelompok marginal yang menjadi pusat perhatian upaya pemberdayaan dan inklusi sosial. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Salah satunya terletak pada aspek teoritis. Penelitian ini menggunakan teori kesejahteraan sosial oleh James Midgley dengan pendekatan tiga dimensi (T3), yaitu pemenuhan kehidupan, pengelolaan masalah, dan kesempatan untuk berkembang. Teori ini belum digunakan dalam studi sebelumnya, yang lebih banyak mengacu pada teori pemberdayaan (Anwar, 2007), teori konvergensi (Lawrence & Kincaid, 1990), pembangunan berkelanjutan (Brundtland, 1997), serta implementasi kebijakan publik (Winarno, 2007). Perbedaan lainnya terletak pada konteks penelitian yang lebih menekankan pada urgensi pemenuhan hak fundamental berdasarkan konstitusi (UUD

1945 Pasal 34), sehingga memberikan nuansa hukum dan hak asasi yang lebih kuat dibandingkan pendekatan kebijakan teknis atau pembangunan umum dalam penelitian sebelumnya. Penelitian Septian & Hadi (2021), Castillo & Larson (2020), dan Lusli et al. (2015) dibandingkan secara konstruktif dengan penelitian di Kota Bekasi dalam hal fokus terhadap stigma disabilitas, pendekatan intervensi, dan orientasi Solusi. Studi tersebut menyoroti pentingnya intervensi edukatif sebagai strategi efektif dalam mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas, baik dalam konteks global (Castillo & Larson) maupun nasional (Septian & Hadi). Lusli et al. menambahkan dimensi pengalaman psikososial langsung dari kelompok terdampak, menggarisbawahi bahwa persepsi terhadap disabilitas bersifat kompleks dan kontekstual. Sementara itu, penelitian di Kota Bekasi tidak berfokus secara spesifik pada intervensi pengurangan stigma, melainkan pada hambatan struktural dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial, termasuk stigma sebagai salah satu faktor penghambat. Penelitian ini lebih menyoroti peran pemerintah dan kelembagaan lokal, serta strategi pemberdayaan sosial sebagai solusi dalam mengatasi tantangan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan demikian, dibandingkan dengan studi lain yang menekankan perubahan sikap masyarakat melalui pendidikan, penelitian Bekasi berorientasi pada transformasi kebijakan dan tata kelola sosial. Dalam perspektif holistik, penelitian Kota Bekasi memperluas konteks dari studi-studi sebelumnya dengan menunjukkan bahwa pengurangan stigma harus dibarengi dengan dukungan sistemik, alokasi anggaran yang memadai, dan keterlibatan aktif berbagai aktor. Ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang terbukti efektif menurut penelitian internasional, akan lebih berdampak bila diintegrasikan ke dalam strategi pemberdayaan sosial dan kebijakan kesejahteraan lokal. Temuan Mulyono et al. (2023) yang berfokus pada strategi pemberdayaan melalui pendidikan batik nonformal. Penelitian tersebut mengidentifikasi tiga pendekatan utama, yakni peningkatan kesadaran dan motivasi, pembentukan komunitas disabilitas, serta pelatihan keterampilan kerja sebagai upaya untuk mendorong kemandirian ekonomi. Sementara itu, Widagdo et al. (2025) mengeksplorasi peran kewirausahaan sosial dan digital sebagai sarana pemberdayaan penyandang disabilitas di Asia Tenggara, dengan menyoroti pentingnya pelatihan vokasional adaptif dan kemitraan lintas sektor, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga penelitian ini sama-sama menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan strategis dalam memenuhi hak-hak disabilitas, namun penelitian penulis memberikan kontribusi penting dalam konteks lokal pemerintahan daerah, khususnya Kota Bekasi, dengan menekankan perlunya sinergi lintas sektor dan intervensi kebijakan yang berkelanjutan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui penggunaan teori kesejahteraan sosial James Midgley yang jarang digunakan secara komprehensif dalam kajian pemberdayaan disabilitas di Indonesia. Dengan mengadopsi tiga dimensi utama Midgley yakni pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberian peluang untuk berkembang penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang holistik dan sistematis. Kebaruan lainnya terletak pada pendekatan normatif yang digunakan, di mana hak konstitusional penyandang disabilitas menjadi titik pijak utama, sehingga tidak sekadar menyoroti aspek administratif atau kebijakan teknis, melainkan juga menegaskan pentingnya keadilan sosial dan inklusi. Selain itu, analisis dilakukan secara terintegrasi pada tingkat mikro

(individu dan keluarga), meso (komunitas dan organisasi), dan makro (kebijakan dan sistem), dengan memperhatikan konteks lokal dan dinamika sosial yang khas di lokasi penelitian. Pendekatan ini menghasilkan pemetaan hambatan dan potensi pemberdayaan yang lebih tajam, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan studi kesejahteraan sosial dan disabilitas di Indonesia.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada aspek teoritis, pendekatan analisis, dan orientasi normatif yang digunakan. Penelitian ini secara khas mengadopsi teori kesejahteraan sosial James Midgley dengan pendekatan tiga dimensi (pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup, dan pemberian kesempatan untuk berkembang), yang belum pernah digunakan dalam studi-studi sebelumnya. Sebaliknya, penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan teori pemberdayaan, teori konvergensi komunikasi, pembangunan berkelanjutan, maupun teori implementasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini menekankan urgensi pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, menjadikannya lebih berorientasi pada pendekatan hak dan keadilan sosial, dibandingkan dengan studi sebelumnya yang cenderung bersifat teknokratik atau berbasis pembangunan umum. Konteks lokal yang spesifik yakni Kota Bekasi juga memberikan perspektif empirik yang berbeda, khususnya dalam mengungkap dinamika interaksi antara kebijakan daerah, organisasi sosial, dan realitas disabilitas dalam kerangka sistem kesejahteraan sosial.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pemenuhan hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas sebagai upaya pemberdayaan di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan fokus pada kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di daerah tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan pendekatan induktif karena bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam makna serta dinamika sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam konteks pemenuhan hak kesejahteraan sosial di Kota Bekasi. Dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositive atau paradigma interpretative, suatu realitas atau obyek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variable (Ridwan & Tungka, 2024). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik masalah yang bersifat kompleks, kontekstual, dan sangat terkait dengan pengalaman subjektif individu. Sejalan dengan pandangan Creswell (1988), penelitian kualitatif difokuskan pada pemahaman makna yang diberikan oleh individu terhadap suatu fenomena sosial, sementara pendekatan deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Mackiewicz (2018), memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi nyata secara rinci tanpa intervensi langsung terhadap variabel yang ada. Meskipun data statistik tidak sepenuhnya diabaikan, penggunaannya tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis secara signifikan, melainkan sebagai pelengkap informasi kualitatif (Sugiyono, 2018).

Pemilihan informan dilakukan secara purposive dan snowball untuk memastikan relevansi dan kedalaman informasi. Informan yang dipilih merupakan representasi dari aktor-aktor kunci dalam sistem kesejahteraan sosial, baik di tingkat pengambil kebijakan maupun pelaksana program dan penerima manfaat. Informan kunci dalam

penelitian ini meliputi Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, karena mereka memiliki otoritas dan pengetahuan menyeluruh mengenai kebijakan dan program pemberdayaan disabilitas. Petugas panti rehabilitasi dipilih karena mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan program dan layanan rehabilitasi. Penyandang disabilitas sebagai subjek utama memberikan perspektif langsung mengenai pengalaman mereka terhadap sistem yang ada. Sementara itu, tokoh pemuda dan perwakilan komunitas berperan dalam penguatan jejaring sosial dan advokasi di tingkat komunitas. Penggunaan teknik pengumpulan data seperti wawancara semi-terstruktur, dalam teknik wawancara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, menyiapkan pedoman wawancara. Kedua, menyiapkan alat untuk wawancara, Ketiga, mengatur waktu untuk wawancara (Simangunsong 2017:215). Pendekatan ini umumnya lebih sesuai dan efisien dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas (Nurdin & Hartati, 2019:179). Observasi partisipatif, dan dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data primer dan sekunder yang kaya, yang kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Pendekatan ini selaras dengan tujuan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut teori Midgley, kesejahteraan sosial tercermin dalam tiga dimensi: pengelolaan masalah sosial dengan baik, pemenuhan kebutuhan, dan terbukanya peluang sosial secara maksimal. Setiap negara, baik maju maupun berkembang, memiliki pendekatan dan sistem kesejahteraan sosial yang berbeda, yang mencerminkan nilai dan keyakinan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga dimensi ini memastikan bahwa aspek-aspek penting dalam kesejahteraan sosial suatu kelompok atau masyarakat dapat tercapai.

3.1 Dimensi I : Tingkat Pengelolaan Masalah Sosial

Menurut Midgley (2005), pengelolaan masalah sosial mencakup strategi dan intervensi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan mikro, meso, dan makro.

1. Tingkat Mikro (Micro-Level): Individu dan Keluarga

Fokus: Intervensi langsung terhadap individu atau keluarga.

a) Bantuan Sosial Ekonomi: Permakanan, sandang, alat bantu, serta bimbingan fisik, mental, dan spiritual.

b) Program Strategis:

1. Home Care Lansia

Home Care Lansia adalah layanan perawatan yang diberikan kepada lanjut usia (lansia) di rumah mereka sendiri, sebagai alternatif dari perawatan di panti jompo atau fasilitas kesehatan. Tujuan utamanya adalah memberikan perawatan yang menyeluruh baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun emosional dalam lingkungan yang nyaman dan familiar bagi lansia.

2. BST Covid-19

Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19" tahun 2020–2021, yang diberikan secara langsung kepada keluarga terdampak pandemi. Program ini tidak hanya

bersifat bantuan material, tetapi juga melibatkan asesmen sosial untuk memastikan bahwa penerima benar-benar membutuhkan.

3. Pemberdayaan Keluarga Harapan : Intervensi gizi, pendidikan, dan akses layanan sosial

c) Rehabilitasi Fisik dan Psikis:

1. Terapi fisik

Terapi untuk memulihkan, mengoptimalkan, memelihara dan mengembangkan kapasitas fisik dan kesehatan serta mencegah gangguan fungsi fisik. Seperti (latihan, pijat, olahraga)

2. Terapi psikososial

Kumpulan terapi untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi PD dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas maupun masyarakat. Tujuannya untuk memperkuat dan memobilisasi potensi klien dan keluarga serta meningkatkan kemampuan pengelolaan diri dalam lingkungan sosialnya, interaksi klien dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas maupun masyarakat. Dapat dilakukan terapi kognitif, afektif, perilaku.

3. Terapi mental spiritual (agama, seni, meditasi)

2. Tingkat Meso: Komunitas dan Organisasi Sosial

Fokus: Peran kolektif komunitas sebagai penghubung individu dan kebijakan.

- a) Kerjasama LSM dan Komunitas: 357 yayasan, termasuk 22 yayasan disabilitas, aktif dalam pelatihan dan advokasi.
- b) Fasilitator Aksesibilitas dan Layanan: Identifikasi kebutuhan disabilitas melalui asesmen langsung.
- c) Edukator dan Advokat Hak: Sosialisasi dan pendampingan hak pendidikan, pekerjaan, dan sosial.

3. Tingkat Makro: Kebijakan dan Regulasi

Fokus: Kebijakan publik dan sistem yang mendukung hak disabilitas.

- a) Kebijakan Inklusif:

1. Perda Kota Bekasi No. 16/2019

Peraturan ini mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab serta hak penyandang disabilitas, komite perlindungan hak penyandang disabilitas dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk berbagai kemitraan, kerjasama, penghargaan, rencana induk, koordinas pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

2. Perwal No. 58/2018

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 58 Tahun 2018 menjadi dasar dalam kerangka hukum Pemerintah Kota Bekasi dalam melindungi hak penyandang disabilitas. Hal-hal yang diatur dalam kerangka hukum ini meliputi : Aksesibilitas terhadap berbagai fasilitas hukum, penyediaan lapangan pekerjaan serta pelayanan publik yang inklusif

bagi penyandang disabilitas. Kemudian tentang kewajiban bagi instansi Pemerintah ataupun swasta terhadap penyandang disabilitas untuk mendukung serta memberikan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas dalam berbagai sektor baik pendidikan, transportasi, pelayanan umum, kesehatan, dan tenaga kerja.

b) Program ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial):

1. Dukungan hidup layak
2. Terapi, pelatihan vokasional, asistensi sosial, dan aksesibilitas
3. Perawatan Sosial dan/atau pengasuhan anak
4. Dukungan keluarga
5. Bantuan sosial dan asistensi sosial

c) Sistem Pendukung Digital: DTKS, PKH, SI-IJAH, dan E-BASOKA

d) Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023: Skor 85,25 (kategori baik)

Berdasarkan kuesioner dari 754 kusioner dengan pendidikan dari sd hingga S2 dengan jumlah responden laki-laki sebanyak 537 orang dan, perempuan sebanyak 217 orang, ini menunjukkan ada kepuasan masyarakat terhadap pengendalian masalah sosial yang ada.

3.2 Dimensi II Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat

Dimensi ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif. Berdasarkan pendekatan pembangunan sosial James Midgley, kebutuhan tersebut meliputi:

1. Subdimensi I: Layanan Kesehatan Inklusif

- a) Pemerintah menyediakan layanan kesehatan ramah disabilitas melalui program ATENSI.
- b) Komponen layanan meliputi: dukungan hidup layak, perawatan sosial, dukungan keluarga, serta terapi fisik, psikososial, mental dan spiritual.

2. Subdimensi II: Fasilitas Publik yang Aksesibel

- a) Dibangun trotoar, halte, gedung pemerintah yang sesuai standar aksesibilitas (kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian).
- b) Penyediaan alat bantu mobilitas dan akomodasi layak (seperti modifikasi kendaraan atau ruang publik) sesuai UU No. 8 Tahun 2016.

3. Subdimensi III: Akses Terhadap Informasi dan Pendidikan Literasi

- a) Penguatan pendidikan inklusif di semua jenjang (SD hingga SMK).
- b) Pemanfaatan teknologi bantu seperti tablet dengan screen reader, keyboard braille, dan aplikasi literasi digital.
- c) Program pelatihan literasi untuk disabilitas sensorik dan vokasional untuk mendukung kemandirian ekonomi.

3.3 Tingkat Kesempatan Untuk Berkembang

Menurut James Midgley, dimensi ini menekankan pentingnya memberikan peluang yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk mengembangkan kapasitas dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

1. Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan

1. Disediakan melalui program pelatihan vokasional: menjahit, tata boga, komputer, barista, otomotif, elektronik, dll.
2. Dilaksanakan di Sentra Kreasi ATENSI, dengan kegiatan seperti:
 - a) Agrowisata, kuliner, workshop keterampilan, konfeksi, daur ulang sampah
 - b) Karya seni (lukisan, fotografi), kerajinan tangan, jasa layanan
 - c) Pelatihan dan rekreasi, termasuk olahraga dan ruang kerja bersama (co-working space)

2. Peningkatan Partisipasi Sosial dan Ekonomi

1. Kemitraan dengan dunia usaha (UMKM) untuk membuka peluang kerja dan wirausaha.
2. Kegiatan komunitas inklusif seperti budaya, olahraga, dan sosial untuk meningkatkan rasa inklusi dan interaksi sosial bagi penyandang disabilitas.

3.4 Tantangan dan Hambatan

Berikut adalah ringkasan hambatan dalam pemenuhan hak kesejahteraan penyandang disabilitas di Kota Bekasi berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis:

1. Hambatan External

Hambatan ini berasal dari dalam diri penyandang disabilitas, baik secara fisik maupun psikologis, yang menghalangi mereka untuk berkembang. Faktor-faktor utama antara lain:

1. Stigma Masyarakat

Pandangan negatif bahwa penyandang disabilitas tidak produktif dan selalu bergantung pada orang lain. Stigma ini menghambat inklusi sosial dan pemberdayaan.

2. Kurangnya Motivasi Individu

Banyak penyandang disabilitas kurang termotivasi mengikuti pelatihan atau kegiatan pemberdayaan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a) Rasa tidak percaya diri akibat pengalaman buruk atau keterbatasan.
- b) Trauma masa lalu karena diskriminasi atau penolakan.
- c) Kurangnya informasi tentang program bantuan.
- d) Lingkungan keluarga yang kurang mendukung, baik terlalu protektif maupun acuh.
- e) Minimnya role model penyandang disabilitas yang sukses.

Dampak dari Hambatan Internal

1. Rendahnya partisipasi dalam dunia kerja, karena dianggap tidak mampu.

Stigma ini menyebabkan peluang kerja bagi penyandang disabilitas menjadi sangat terbatas. Perusahaan cenderung enggan merekrut karena menganggap penyandang disabilitas membutuhkan penyesuaian khusus yang dianggap "menyulitkan" atau "kurang produktif". Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja dan memperkuat siklus kemiskinan serta ketergantungan mereka terhadap bantuan sosial.

2. Isolasi sosial dan penurunan kepercayaan diri karena penolakan dan diskriminasi.

Diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas menciptakan dampak psikososial yang signifikan, yang pada akhirnya memperburuk keterasingan dan menghambat proses inklusi sosial mereka.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah kesamaan dengan studi-studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Hayati (2019), Mulyana dan Wusqo (2023), serta Harahap dan Maheswara (2021), terutama dalam hal fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas dan keterlibatan pemerintah sebagai aktor utama. Sama halnya dengan studi Hayati (2019), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam peran pemerintah dalam mendorong inklusi sosial bagi kelompok disabilitas. Kesamaan lainnya terletak pada subjek penelitian, yakni penyandang disabilitas sebagai kelompok marginal yang menjadi pusat perhatian dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan yang membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori kesejahteraan sosial James Midgley dengan tiga dimensi utama—pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesempatan untuk berkembang—yang belum digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Studi-studi terdahulu lebih banyak mengacu pada teori pemberdayaan (Anwar, 2007), teori konvergensi (Lawrence & Kincaid, 1990), pembangunan berkelanjutan (Bruntland, 1997), dan implementasi kebijakan publik (Winarno, 2007). Selain itu, konteks penelitian ini menonjolkan urgensi pemenuhan hak fundamental penyandang disabilitas yang bersumber langsung dari konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 34, sehingga memberikan nuansa hukum dan hak asasi manusia yang lebih kuat dibandingkan dengan pendekatan kebijakan teknis atau pembangunan umum dalam penelitian sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak kesejahteraan penyandang disabilitas di Kota Bekasi telah mencakup tiga dimensi kesejahteraan sosial menurut Midgley: pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberian kesempatan untuk berkembang. Pemerintah melalui Dinas Sosial dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur telah menyediakan bantuan sosial, layanan rehabilitasi, akses kesehatan, fasilitas publik yang inklusif, pendidikan literasi, serta pelatihan keterampilan. Meski demikian, tantangan seperti stigma masyarakat dan

kurangnya motivasi individu masih menjadi hambatan internal yang signifikan dalam mewujudkan inklusi sosial secara menyeluruh.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah yang terbatas pada Kota Bekasi dan belum mencakup perspektif penyandang disabilitas dari berbagai latar belakang kondisi atau usia secara mendalam. Selain itu, data yang digunakan lebih berfokus pada pendekatan kualitatif, sehingga belum memberikan gambaran kuantitatif mengenai dampak program secara statistik. Arah penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah kajian ke kota atau daerah lain untuk membandingkan kebijakan dan implementasinya, serta mengintegrasikan pendekatan kuantitatif guna mengukur efektivitas program secara lebih terukur. Penelitian mendatang juga disarankan untuk mengeksplorasi peran komunitas lokal dan keluarga dalam mendukung inklusi sosial penyandang disabilitas secara lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam kepada Dinas Sosial Kota Bekasi, dan Sentra Terpadu Pangudiluhur milik Kementerian Sosial di Kota Bekasi. yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, 2007. Manajemen Pemberdayaan Perempuan. Bandung : Alfabeta
- Brundtland, G. H. (1987). Our common future world commission on environment and development.
- Castillo, Y. A., & Larson, A. (2020). Attitudes towards people with disabilities: a systematic review of intervention effectiveness. *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education*, 5(2), 40-57.
<https://doi.org/10.23916/0020200526120>
- Creswell. 1988. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among. Five Tradition. Sage Publication, London
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P, & Sadaly. 2020. Kendala mewujudkan pembangunan
https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.p df
- Hayati, S, Maulana. 2018 Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai. (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/PEMAS/article/view/6893>
- Lusli, M., Zweekhorst, M. B., Miranda-Galarza, B., Peters, R. M., Cummings, S., Seda, F. S., ... & Irwanto, F. (2015). Dealing with stigma: experiences of persons affected by disabilities and leprosy. *BioMed research international*, 2015(1), 261329. <https://doi.org/10.1155/2015/261329>
- Manopo, T. P., Singkoh, F, & Kasenda. 2021. Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Kecamatan Langowan Timur).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/36078>

- Mackiewicz, J. 2018. A Qualitative, Quantitative Mixed-Method Approach. In Writing Center Talk over Time. Sage Publications, Inc. California
- Midgley. 2005. Social development : the developmental perspective in social welfare, Sage Publication Inc. California.
- Mulyana, M., & Wusqo. 2023. Implementasi Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru. J-3P Pemerintahan). (Jurnal Pembangunan <https://scispace.com/journals/j-3p-jurnal-pembangunan-pemberdayaan-pemerintahan-2ob25244/2023>)
- Mutmainnah. 2018. Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat, Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. (Journal of Education and Social <https://ejournal.papanda.org/index.php/ijess/article/view/392>)
- Mulyono, S. E., Putra Widhanarto, G., Sutarto, J., Malik, A., & Shofwan, I. (2023). Empowerment strategy for people with disabilities through nonformal batik education program. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 42(3), 683–694. <https://doi.org/10.21831/cp.v42i3.59191>
- Nurdin. I & Hartati. (2019). Metodologi Penelitian Sosial.
- Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). *Metode penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Reiki Nauli Harahap ,Arnola Septa Maheswara. (2021). Pemberdayaan Kelompok Rentan Difabel Melalui Kemitraan Multipihak. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 1(2), 164–178. <https://doi.org/10.47431/jmd.v1i2.156>
- Lawrence Kincaid. Rogers, Everett M., D. 1981. Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research.
- Septian, E. R., & Hadi, E. N. (2021). “Reducing Stigma of People with Disabilities: A Systematic Review”™. *Journal of Medical and Health Studies*, 2. <https://doi.org/10.32996/jmhs.2021.2.2.3>
- Simangunsong, F. (2017). Metode Penelitian Pemerintahan. Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Alfabeta. Jakarta.
- Winarno, B. (2007). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widagdo, A. K. ., Rahmawati, R., Purnomo, R. A. ., Jaafar, N. I. ., & Markhumah, U. . (2025). Advancing disability inclusion through social and digital entrepreneurship in ASEAN. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(3), 1139–1152. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i3.6764>
- Yanuarita 2021. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kota JISIP (Jurnal Sosial dan Pendidikan) <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2556>
- Zachari, N, Dewi, Fatihah, R. P, & Septiana. 2024. Empowering People with Disabilities through Batik Toeli Laweyan Industry in Surakarta Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas melalui Industri Batik Toeli Laweyan di Surakarta.

